

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Atzuarni Hasugian¹, Nur'ainun Hasibuan², Yenni Sofiana Tambunan³

Mahasiswa, Prodi Manajemen Keuangan STIE Al-Washliyah Sibolga

Korespondensi Penulis : arny.hasugian@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain an overview of the implementation of financial SIMDA at the Department of Youth and Sports (DISPORA) of Central Tapanuli Regency, as well as to find out the supporting factors owned by DISPORA of Central Tapanuli Regency so that they are able to apply financial SIMDA, as well as the quality of information generated from its application. Informants in the study were 4 people consisting of employees and staff of the Central Tapanuli District Youth and Sports Office, namely treasurers, financial administration officials, assistant treasurers and assistant financial administration officials. Data was collected through a process of direct interviews with informants using interview guides, direct observation of the activities of DISPORA employees of Central Tapanuli Regency, as well as documentation studies of related documents. The results of the interviews and data that have been collected are analyzed using descriptive methods using a phenomenological approach. The results of the research show that in general, DISPORA staff of Central Tapanuli Regency already understand the meaning of financial SIMDA and an overview of its implementation related to input and output data. The factors owned to support the implementation of financial SIMDA implementation are communication, human resources, attitude/disposition and bureaucratic structure, while the quality of information resulting from the application of Financial SIMDA is reliable, timely and relevant.

Keywords: Regional Management Information System (SIMDA) Finance.

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999** tentang pemerintahan daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang pemerintahan daerah yaitu, Otonomi daerah berdasarkan **Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan Negara dengan mengeluarkan undang-undang keuangan Negara (**Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara, **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang perbendaharaan Negara dan **Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya Laporan Keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik; (i) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, (ii) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (iv) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010** perubahan atas **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005** tentang, sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001** tentang, informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut.

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat Pembina Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mengemban amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005** untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh, termasuk pada setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) salah satunya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemerintah Daerah dari 542 Pemerintah Daerah yang ada, dan terdiri dari 7 jenis program aplikasi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan Aplikasi SIMDA

No	Jenis Implementasi	Jumlah Pemda
1	SIMDA Keuangan	394 Pemda
2	SIMDA BMD	403 Pemda
3	SIMDA Gaji	51 Pemda
4	SIMDA Pendapatan	169 Pemda
5	SIMDA <i>Integrated</i>	196 Pemda
6	<i>Dashboard</i> Keuangan	5 Pemda
7	Koneksi CMS	225 Pemda
	Pemda Pengguna SIMDA	440 Pemda

Sumber : Situs resmi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dengan adanya ketujuh program aplikasi tersebut, sehingga *Outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan *Monitoring* terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

a. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (**BPKP, 2008**), adalah :

- 1) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- 2) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *Webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- 3) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- 4) Sebagai media awal bagi pelaksanaan *E-Government*; dan
- 5) Sebagai sarana untuk pelaksanaan *Good Government*.

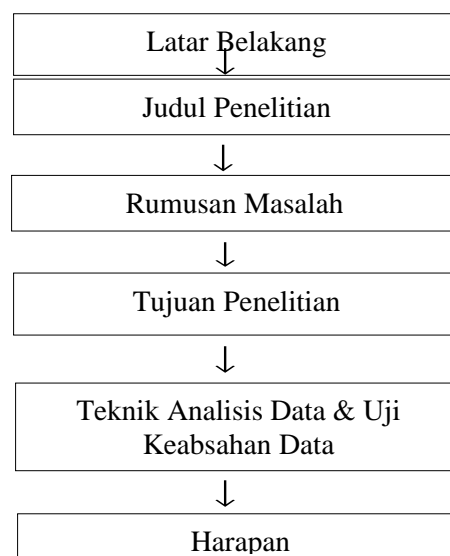
b. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi (**BPKP, 2008**), adalah sebagai berikut :

- 1) *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
- 2) Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- 3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 - a) *Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - b) *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

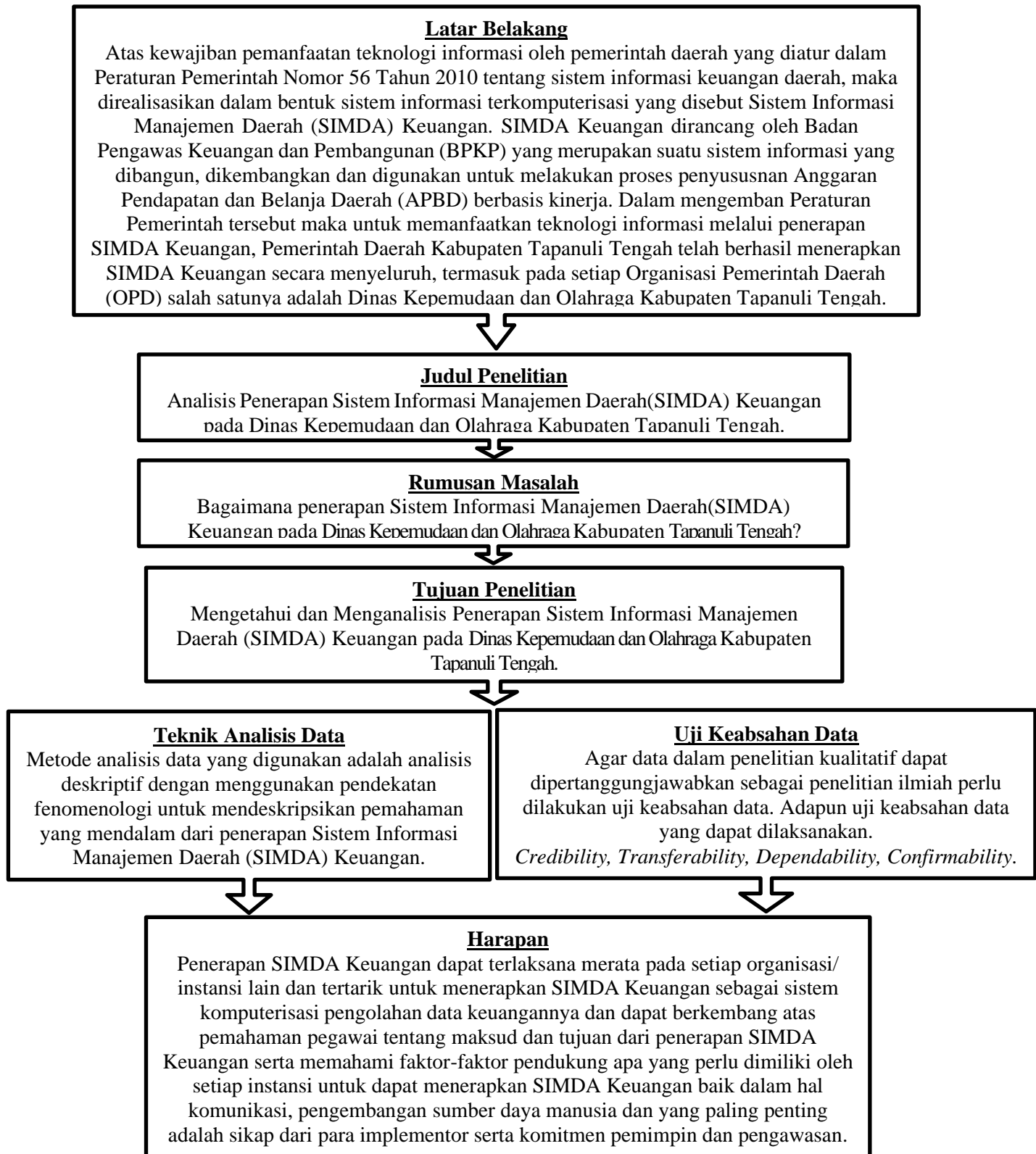
Rancangan Isi

Rancangan isi merupakan penjelasan secara singkat atau kesimpulan dari masalah yang akan diteliti sehingga menjadi suatu penelitian. Rancangan biasanya memuat isi sebagai berikut :



Gambar 2.1. Rancangan Isi

Dari penjelasan gambar diatas sehingga peneliti membuat rancangan isi sebagai berikut:



Gambar 2.2 Rancangan Isi Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana penulis mengumpulkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi diperusahaan kemudian mengolah menjadi kalimat, dan dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menurut **Creswell** dalam (**Sugiyono, 2014**) adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data oleh peneliti yang kemudian diolah untuk menemukan makna dari apa yang telah dikemukakan oleh partisipan. Fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perjalanan hidup seseorang.

Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas *subyek* yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*).

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi *obyek* atau situasi yang diteliti. Pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*).

Teknik Pengumpulan Data

Lofland dalam **Natsir (2017)** mengatakan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Secara garis besar data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

- a. Data yang diperoleh dari interview (wawancara)
- b. Data yang diperoleh dari observasi
- c. Data yang berupa dokumen, teks, atau karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonversikan ke dalam bentuk narasi).

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

- a. Data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian,
- b. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya,
- c. Mencari keterkaitan antara tema,
- d. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan, dan
- e. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual yang disajikan dalam bab IV.

Uji Keabsahan Data

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. “Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data” (Sugiyono, 2007:274).

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. “Teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar” (Sugiyono, 2007:274).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan SIMDA Keuangan Dispora Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Keuangan dan Staf/ Pembantu Bendahara Keuangan, yang terkait langsung dengan proses manajemen keuangan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Hasil analisis dari data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Informasi Yang diperoleh	Sumber	Tema yang ditemukan
Sistem yang berbasis komputerisasi untuk mengolah transaksi-transaksi keuangan	Wawancara, Observasi	Pemahaman Makna SIMDA Keuangan
Membantu dalam sisi pelaporan	Wawancara, Observasi	Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan
Mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD		
Memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah	Wawancara, Observasi	Output yang Dihasilkan
Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan untuk bagian keuangan yaitu RKA, DPA, dan SPD		
Pada bagian penatausahaan keuangan yang dihasilkan yaitu SPP, SPM, SP2D dan STS		
Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data SIMDA Keuangan pada bagian keuangan yaitu		

buku besar dan laporan		
Perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan neraca		
RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan		
DPA memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan		
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana		

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2022)

Tabel 4.3

Analisis Data Faktor-faktor Pendukung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah

Informasi Yang diperoleh	Sumber	Tema yang ditemukan
Penerapan SIMDA Keuangan dikomunikasikan terlebih dahulu	Wawancara, Observasi	Komunikasi
Sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan dilakukan secara bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung		
Dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP	Wawancara, Observasi	Sumber Daya Manusia
Peningkatan SDM melalui diskusi/curah pikir dengan kepala kantor, sesama pegawai atau melalui BPKPAD Kab. Tap. Tengah		
Setiap tahun dilakukan sosialisasi untuk menambah pemahaman kepada OPD		
Sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan	Wawancara, Observasi	Disposisi/Sikap
Sangat membantu dalam proses transaksi keuangan dan lebih mengefektifkan waktu		
Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga kegagalan sistem dapat diminimalisir	Wawancara, Observasi	Struktur Birokrasi

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2022)

Tabel 4.4

Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Informasi yang dihasilkan	Sumber	Tema yang ditemukan
Informasi yang dihasilkan dapat diandalkan	Wawancara, Observasi	Andal
Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai <i>deadline</i> yang telah ditentukan	Wawancara, Observasi	Ketepatan Waktu
Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing secara otomatis oleh sistem	Wawancara, Observasi	Relevan
Setiap menu aplikasi yang terdapat dalam SIMDA Keuangan saling berhubungan		

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2022)

Hasil Uji Keabsahan Data

Berikut penjelasan dari triangulasi teknik:

1) Observasi

Tahap awal sebelum peneliti memutuskan seseorang atau informan, lalu melakukan observasi. Dengan adanya observasi membuat peneliti lebih mengetahui objek, kondisi dan bagaimana terjadinya limpahan pengetahuan diantara sumber daya manusia dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Observasi ini dilakukan dengan perkenalan saat memberikan surat riset langsung ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertemuan langsung dengan Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk memberikan izin kepada peneliti untuk dapat meneliti di lokasi tempat meneliti. Sebelum peneliti pamit untuk pulang peneliti meminta izin untuk menyimpan *contact person* Bendahara. Setelah mendapatkan *contact person* peneliti membuat janji untuk, melakukan wawancara. Kemudian melakukan observasi langsung ke ruangan Bendahara dan ruangan Pejabat Penatausahaan Keuangan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari teknik yang peneliti gunakan di dalam penelitian, hal ini peneliti anggap sebagai keadaan dimana informasi diperoleh dengan melanjutkan teknik pengamatan yaitu wawancara atau dengan menanyai para informan guna menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti dalam menghimpun data ialah melakukan wawancara dan diskusi mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan kepada pihak yang menekuni bidang ini seperti Bapak Alfin Rivana Sembiring (Bendahara), Bapak Irwansyah, S.E (Pejabat Penatausahaan Keuangan), dan Bapak Robby Syahputra Pardede (Staf/Pembantu Bendahara). Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam. Pelaksanaan wawancara mendalam ditujukan kepada Bapak Alfin Rivana Sembiring selaku bendahara keuangan dan Bapak Irwansyah, S.E selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan. Pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan untuk menambah data-data yang telah didapatkan sebelumnya melalui observasi. Dokumen mengenai Profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pedoman wawancara terlampir pada lampiran penelitian, pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu dan sudah dilakukan validitas eksternal.

3) Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan bagian yang tidak terlepas dari Teknik yang dijalankan di dalam penelitian ini seperti observasi dan wawancara. Dokumentasi sendiri berperan sebagai penguat informasi dari hasil wawancara ataupun dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung dari awal hingga diakhir penelitian. Informasi yang peneliti peroleh dari dokumentasi merupakan penggambaran dari apa yang peneliti amati, telusuri, dan dapatkan secara sengaja guna mendokumentasikan perjalanan penelitian seperti diantaranya foto dari lokasi penelitian, foto dari innforman yang teridentifikasi, foto kegiatan-kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah dan foto yang terkait dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) Keuangan.

PEMBAHASAN

Pemahaman Pegawai Tentang SIMDA Keuangan

Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum, pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini terbukti dari wawancara dengan beberapa staf/pegawai di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya dengan bapak Irwansyah, S.E seorang Pejabat Penatausahaan Keuangan yang bertugas dalam penatausahaan keuangan dan pengoperasian SIMDA Keuangan yang mengatakan “yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelola transaksi-transaksi keuangan daerah”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Aliansyah Panggabean, S.Pd seorang staf/pembantu pejabat penatausahaan keuangan yang mengatakan bahwa, “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegritas yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah”. Dalam wawancara dengan Bapak Robby Syahputra Pardede, juga mengungkapkan bahwa:

“sebenarnya penerapan tidak dipaksakan, ini hanya salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua OPD atau instansi pemerintah di pemerintah kabupaten ini”

Faktor- faktor Pendukung yang Dimiliki Dispora Kab. Tapanuli Tengah dalam Penerapan SIMDA Keuangan

a. Komunikasi

Komunikasi dalam bentuk sosialisasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai penerapan SIMDA Keuangan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.E, berikut ini: “yah tentu dek, sebelum diterapkan sudah ada komunikasi dari atasan, kalau ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru maka akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan kebijakan atau manfaat penerapannya”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Robby Syahputra Pardede, beliau mengatakan :“Pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke bawahan ataupun antara sesama pegawai. Tidak mungkin kita menerapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu”

Sumber Daya Manusia

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dalam wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.E, yang mengatakan: “salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM di sini khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP”. Selain itu dalam wawancara dengan Bapak Aliansyah Panggabean, S.Pd, beliau juga mengatakan bahwa: “peningkatan SDM itu tidak hanya bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, tapi bisa juga melalui curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang pengoperasian sistem ini”

Disposisi/ Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. “Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah” (**Edward III : 1980**).

Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan SIMDA Keuangan. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan salah seorang staf/pembantu bendahara keuangan yang mengatakan bahwa, “saya sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan”

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Bapak Irwansyah, S.E, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu lah”

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apayang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. “Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana” (**Edward III : 1980**).

Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah sudah cukup baik. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan Bapak Alfin Rivana Sembiring, beliau mengatakan bahwa :

“Di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat operator SIMDA bertugas untuk mengawasi jalannya penerapan sistem itu. Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi mereka telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya mereka memiliki server cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat digunakan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainpun tidak pernah mengeluh dengan membuat laporan-laporan. Itulah gunanya tim administrator mereka sebagai pengawas”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA Keuangan. Dengan adanya pengawasan yang baik dan perhatian khusus oleh tim administrator dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi, contohnya dengan pengadaan server cadangan. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan SIMDA Keuangan.

Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

Dalam wawancara dengan Bapak Alfin Rivana Sembiring selaku Bendahara. Beliau mengatakan bahwa.

1. Ketepatan waktu

“setelah diterapkannya SIMDA Keuangan ini, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi atau tidak malas untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, itu karena apa dek? karena mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat, saya kira seperti itu”

2. Andal

“yahhh.. sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah tentang sistem ini, ekspor-import data juga lancar-lancar saja, laporan kita juga tidak bermasalah di BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah”

3. Relevan

“setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data ke dalam sistem, dan sistem yang mengolahnya. Kalau sistem tidak saling berhubungan, yah berarti sistemnya gagal dong”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan definisi kualitas informasi dari ketiga karakteristik diatas yang berarti tepat waktu, saling berhubungan, dan dapat diandalkan. Ungkapan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah sudah cukup baik. Tertundanya penyajian laporan keuangan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem jarang terjadi, justru pegawai menjadi termotivasi dengan adanya sistem ini karena sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dalam sistem bekerja saling secara integritas dan saling berhubungan satu sama lain, setiap transaksi dikelompokkan secara otomatis menurut jenisnya masing-masing oleh sistem, sehingga pegawai hanya bertugas untuk menginput data ke dalam sistem. Setiap laporan yang ditransfer ke BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya sistem ini, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik.

Manfaat Penerapan SIMDA Keuangan

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
- b. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan

- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
- 1) *Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 2) *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Secara umum pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya.
- 2) Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penerapan SIMDA Keuangan secara optimal, antara lain: 1) Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut; 2) Sumber Daya Manusia yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya; 3) Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin; 4) Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi.
- 3) Diketahui bahwa ternyata Sumber Daya Manusia dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah didukung oleh beberapa faktor dalam hal SDM nya, yaitu: 1) Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya; 2) Untuk penerapan SIMDA Keuangan, pegawai dibekali dengan pelatihan, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya; 3) Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan aplikasi SIMDA keuangan antar pegawai serta koordinasi yang baik.
- 4) Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor, dalam faktor Disposisi/Sikap respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.
- 5) Pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA Keuangan. Karena adanya pengawasan yang baik dan perhatian khusus oleh tim administrator dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 6) Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan sudah cukup baik, antara lain: 1) Ketepatan Waktu; 2) Andal; 3) Relevan.
- 7) Manfaat yang diperoleh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan sesuai dengan yang telah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut: 1) *Database* terpadu; 2) Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan 3) Fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Mohammad. (2015). *Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 18 (3). 119-131.
- Creswell. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. (<http://penalaran-unm.org/2016/11/12/metode-penelitian-kuantitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>). Diakses 31 januari 2017.
- Erning, Nafischa. (2021). *Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 16. 12-28.
- Hariyanto, Slamet. "Sistem Informasi Manajemen". *Jurnal PUBLICIANA* 9.1 (2016): 80-85.
- Siregar, Udean. (2020). *System Informasi Manajemen*. Sibolga: Stie Aw Sibolga/Tapteng.
- Natsir, Irmayani. (2017). *Analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 33, 1-33.
- Raymond McLeod J. (2010). *Management Information System*. Prentice Hall.
- Rochaety, E., Ridwan Z, F., Setyowati, T. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Mitra Wacana Media.
- Stoner, J.A.F. (1991). *Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- Sutanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingkar Jaya.
- Susanto.A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan* (Edisi Perd). Lingga Jaya.
- Sutarman. (2012). *Buku Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara.
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta.
- Machmud, R. (2013). Peranan penerapan system informasi manajemen terhadap efektivitas kerja pegawai Lembaga pasyarakatan narkoba (lapastika) bollangi kabupaten gowa. *Jurnal capacity STIE AMKOP Makassar*, 9(3), 409-421.
- Sutanta, Edhy. (2003). *Sistem informasi manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mohume, C. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo: Skripsi tidak diterbitkan.
- Nifta, husaadah. (2013). *Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pembuatan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dan sesudah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Bandung. Bandung: Skripsi tidak diterbitkan.

- Pangestika, A. L. (2016). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. Tegal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang *Informasi Keuangan Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Pulungan, M. Soleh. (2014). *Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas*. Jurnal Bina Praja. 6 (4). 269-282.
- Ridwan. 2009. *Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu*. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Satgas Pengembangan SIMDA. 2011. *Bimbingan Teknis SIMDA keuangan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Satgas Pengembangan SIMDA. 2008. *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- <http://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html>. Diakses 14 Juni 2022.
- Wira Pangestu, Danu. 2007. *Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. (ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2008_sim.pdf). Diakses 13 Juni 2022.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka.